

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020 mengacu pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020, RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah..

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat (4) disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Penyusunan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3.1 Maksud

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan kegiatan terhadap capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan di tahun 2020 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar sampai dengan triwulan dua tahun 2020.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020.

1.4. Sistematika Perubahan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang RKPD
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum RKPD
- 1.4 Sistematika RKPD

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Bab III Program dan Kegiatan dalam Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal, kegiatan penertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran berada pada empat bidang yaitu Bidang Ketertiban umum, ketentraman, Bidang Penegakan Peraturan daerah, Bidang Perlindungan masyarakat dan bidang Pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok melaksanakan 8 program dengan 24 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.197.351.569,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 2.371.690.736,- ,atau 38,27%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat kegiatan yang tidak bisa terealisasi seperti belanja pakaian kerja lapangan pada kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan karena terjadi gagal tender yang disebabkan keterbatasan waktu dll, tetapi secara fisik kegiatan telah terlaksana sesuai ketentuan. Selain itu, ada beberapa belanja yang perlu penambahan dan pengurangan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

Pada anggaran kasnya triwulan III. Kegiatan yang telah terealisasi tetapi masih rendah antara lain : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (16,47%) dan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (24,32%).-

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan II tergolong baik, namun terdapat kekurangan beberapa belanja serta kelebihan pagu anggaran pada belanja lainnya, sehingga perlu dilakukan penambahan dan pergeseran anggaran untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sampai triwulan II Tahun 2020 dan tingkat capaian Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

1	2	3				4	5	6		7		8		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								13=9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
														9		10		11		12								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya kualitas aparatur	00	01			Program administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	3.486.960.904	86,70%	1.530.786.704	100%	368.902.569	25%	101.466.963	25%	164.102.980					50%	265.569.943	137%	1.796.356.647	23%	0,52	Satpol PP dan Damkar
				02	01	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	Jumlah tenaga honor Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	88%	7.000.000																			
				01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah ramngko, materai dan benda pos	600%	18.300.000	99%	40.980.000		2.000.000	78%	150.000	35,25%	705.000					42,75%	855.000	142%	41.835.000	24%	2,29	
				02	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	600%	237.420.000	90%	85.057.539	100%	29.500.000	39,40%	11.339.186	5,15%	1.520.130					43,59%	12.859.316	134%	97.916.855	22%	0,41	
				06	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional	Jumlah pembayaran pajak / balik nama/ kir kendaraan bermotor	600%	115.445.900	95%	22.122.400	100%	23.222.950	3'83%	889.050	12,64%	2.935.900					16,47%	3.824.950	111%	25.947.350	19%	0,22	
				08	4	penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran retribusi sampah	600%	9.000.000	100%	3.600.000	100%	1.800.000											100%	3.600.000	17%	0,40	
				10	5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	600%	132.026.504	99%	62.427.037	100%	18.000.000	59'15%	10.648.600	13,74%	2.474.400					72,91%	13.123.000	172%	75.550.037	29%	0,57	

				11	6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan	600%	84.500.000	99%	25.277.150	100%	12.000.000	23,25%	2.790.000	35,91%	4.309.250					59,1%	7.099.250	158%	32.376.400	26%	0,38			
				12	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penyerangan	600%	45.500.000	100%	9.490.000	100%	4.000.000											100%	9.490.000	17%	0,21			
				13	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	600%	356.000.000	100%	53.725.000	100%	62.608.619			95,97%	60.088.000						95,97%	60.088.000	196%	113.813.000	33%	0,32		
				14	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	600%	28.500.000	100%	41.985.000												0%	-	100%	41.985.000	17%	1,47		
				17	9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman ratat dan tamu	600%	603.936.000	99%	472.879.000	100%	30.000.000			37,56%	11.266.500							37,56%	11.266.500	137%	484.145.500	23%	0,80	
				18	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600%	571.929.500	99%	299.403.578	100%	80.000.000	77,06%	61.650.127	9,42%	7.538.800							86,48%	69.188.927	185%	368.592.505	31%	0,64	
				19	11	Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan dan teknis perkantoran	Jumlah perlindungan administrasi keamanan teknis perkantoran	600%	240.000.000	70,62%	18.360.000														71%	18.360.000	12%	0,08		
				20	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	600%	1.044.403.000	100%	395.480.000	100%	105.771.000	13,24%	14.000.000	69,27%	73.265.000							82,51%	87.265.000	183%	482.745.000	30%	0,46	

						daerah	dalam daerah																			
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	00	02			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	6.252.403.000	99,92%	519.634.759	100%	192.650.000	33,70%	64.930.705	100%	49.805.869				100%	114.736.574	200%	634371333	33%	0,10
				24	15	Pemeliharaan rutin/ken daraan dinas/operasioanl	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	600%	1.824.815.000	99%	426.478.409	100%	160.000.000	38,84%	62.139.705	30%	48.000.869				69%	110.140.574	168%	536618983	28%	0,29
				05	13	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jmlah pengadaan kendaraan dinas/operasioanl	600%	4.306.438.000	100%	71.700.000										100%		200%	71700000	33%	0,02
				30	16	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	600%	17.000.000	100%	7.250.000	100%	5.000.000			36,10%	1.805.000				36,10%	1.805.000	136%	9055000	23%	0,53
				22	14	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	600%	104.150.000	98%	14.206.350	100%	27.650.000	10,09%	2.791.000						10,09%	2.791.000	108%	16997350	18%	0,16
3	Disiplin aparatur	00	05			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	600%	1.022.800.000	100%	131.317.500												100%	131317500	17%	0,13
				07	17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan PDL dan PDU beserta atributnya	600%	1.022.800.000	99%	131.317.500												99%	131317500	17%	0,13
4	Peningkatan pengetahuan aparatur	00	05			Program peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur	Persentase pengetahuan bagi aparatur Satpol PP dan Damkar	600%	155.000.000			100%	30.000.000													

				07	18	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran dan bencana	Jumlah pendidikan dasar bagi aparaturnya Satpol PP dan Damkar	600%	30.000.000			100%	30.000.000												
				07	16	Peningkatan Sumberdaya aparaturnya	Jumlah pembinaan aparaturnya	600%	125.000.000	96%	13.393.750	100%	79.964.000		4,67%	3.735.000		4,67%	3.735.000	100%	17128750	17%	0,14		
5	Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	00	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	600%	88.750.000	100%	22.406.050	100%	37.939.400	1,23%	465.000	16,78%	6.365.250		100%	6.830.250	200%	29236300	33%	0,33	
				01	17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	600%	88.750.000	99%	22.406.050	100%	37.939.400	1,23%	465.000	16,78%	6.365.250		18%	6.830.250	117%	29236300	20%	0,33	
6	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	05	15			Program Peningkatan dan keamanan lingkungan	Persentase kenyamanan lingkungan	600%	15.324.232.200	99,60%	3.343.287.194	300%	3.348.501.600	18%	234.491.570	816.446.976		100%	1.050.938.546	200%	4394225740	33%	0,29		
				05	20	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli gabungan bersama TNI dan Polri	600%	5.649.754.000	99%	343.728.400	100%	1.699.828.500	13,43%	228.284.270	24,75%	420.696.105		38,18%	648.980.375	137%	992708775	23%	0,18	
				07'	21	Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketertamanan dan	Jumlah Patroli rutin dan pemeliharaan ketertamanan dan	200%	7.968.405.100	94%	2.923.047.794									94%	2923047794	47%	0,37		

						ketertiban	ketentraman masyarakat																		
				03	19	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Jumlah Pembekalan Linmas dalam rangka Pemilu Pilpres dan Pileg	100%	1.648.673.100			100%	1.648.673.100			24%	395.750.871			24%	395.750.871	24%	395750871	24%	0,24
				08	22	Pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas dalam daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas dalam daerah	200%	57.400.000	99%	76.511.000									99%	76511000	50%		1,33	
				14	21	Penyusunan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta Aturan-aturan Teknis dan Pelaksananya	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta Aturan-aturan teknis dan Pelaksanaannya	100%	145.604.000			100%	145.604.000	4,25%	6.207.300	29,50%	42.949.508			34%	49.156.808	34%	49156808	34%	0,34

7	Peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat dan pelajar	05	17			Program pengawasan wawasan kebangsaan	Persentase wawasan dan rasa kebangsaan	200%	101.150.000	100%	97.175.850	100%	2.000.000							100%	97175850	50%	0,96		
				17	06	Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab.Solok	Jumlah Terlaksana upacara bulanan	600%	52.600.000	99%	49.962.250									99%	49962250	17%	0,95		
				07	23	Peringatan hari jadi dan HUT RI	Jumlah peringatan hari jadi Satpol PP dan Damkar, linmas dan HUT RI	200%	48.550.000	100%	47.213.600	100%	2.000.000							100%	47213600	50%	0,97		
8	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	5	19			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	persentase ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kab.Solok	600%	496.707.000	1	240.924.000		70.730.000	23,29%	16.475.100	44,13%	31.214.204		67%	47.689.304	165%	288613304	28%	0,58	
				01	22	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah sistim keamanan di masyarakat	600%	496.707.000	98%	240.924.000	100%	70.730.000	23,29%	16.475.100	44,13%	31.214.204		67%	47.689.304	165%	288613304	28%	0,58	

9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat kab.Solok	05	01			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Persentase kemandirian di lingkungan masyarakat	500%	478.500.000																	
				20	09	Penyuluhan praktek perjudian dan penggunaan minuman keras	Jumlah penyuluhan pada masyarakat dan pelajar	500%	478.500.000	100%	52.899.000									100%	52899000	20%	0,11			
10	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan bahaya kebakaran	05	23			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan kebakaran	500%	9.611.553.400	99,08%	2.972.088.536	100%	2.116.953.000	26%	331.685.843	25,88%	499.780.795		51%	831.466.638	151%	380355174	30%	0,40		
				03	24	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebaya kebakaran	Jumlah pencegahan dini dan terkendalinya bahaya kebakaran dan berkurangnya kerugian yang ditimbulkan akibat bahaya kebakaran	500%	8.202.971.000	98%	2.972.088.536	100%	1.801.960.000	18,00%	324.295.843	25,88%	466.306.795		44%	790.602.638	142%	3762691174	28%	0,46		
				23	04	Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional	Jumlah standar pelayanan pencegahan bahaya kebakaran	400%	1.287.482.400			100%	299.993.000													

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SATPOL PP DAN AMKAR TAHUN 2020

Urusan Penunjang Pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 7.911.173.250,- dengan 10 program dan 33 kegiatan. dengan jumlah program dan kegiatan yang sama dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sebesar Rp. 38.500.000,- penyesuaian tarif telepon, air, dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sebesar Rp. 30.000.000,-
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp. 1.800.000,-;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp.26.400.000,- ;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 20.000.000,-;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 12.000.000,-
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 97.000.000,-
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 4.000.000,-
- 10) Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 50.000.000,-
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.120.000.000,-
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.250.000.000,-

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional sebesar Rp. 700.000,-
 - 2) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor sebesar Rp. 125.000.000,-
 - 3) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional bertambah sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 10.000.000,-

3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 1) Pengadaan pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 300.000.000,-

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 1) Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur sebesar Rp. 12 500.000,-
 - 2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi satgas Pol PP sebesar Rp. 75.000.000,-

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 22.000.000,-

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp. 90.000.000,-
 - 2) Pengendalian keamanan lingkungan berkurang sebesar Rp. 1.512.719.500,-
 - 3) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban serta aturan-aturan teknis dan pelaksanaannya sebesar Rp. 300.000.000,-

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindakan Kriminal
 - 1) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan sebesar Rp. 73.000.000,-

8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat sebesar Rp. 77.250.000,-
 - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu sebesar Rp. 20.000.000,-

9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
 - 1) penyuluhan pencegahan praktek perjudian dan berkembangnya praktek prostitusi, penggunaan minuman keras dan narkoba sebesar Rp. 106.347.500,-

10. Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Pembakaran
 - 1) Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Manuali Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan bencana kebakaran sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3) Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran sebesar Rp. 83.000.000,-
 - 4) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran sebesar Rp. 1.546.216.250,-
 - 5) peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar Rp. 197.140.000,-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA RENJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2020

No	Urusan Pemerintah Daerah/	Prioritas	Capaian Program (Indikator Sasaran)		Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (Output)		Pagu Indikator Tahunan
	Program /Kegiatan		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05	Ketertiban, Ketentraman dan perlindungan Masyarakat						7.911.173.250
1.01.1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	IKM	BB	Nilai IKM	100%	653.700.000
1.01.1.01.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1			Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Materai 350 lembar, 4 buku cek	4.000.000
1.01.1.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2			Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	3 rekening, 5 token, 12 bulan	38.500.000
1.01.1.01.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3			Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	15 unit	30.000.000
1.01.1.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4			Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit	1.800.000
1.01.1.01.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	5			Jumlah jenis yang diadakan	56 jenis	26.400.000
1.01.1.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6			Jumlah barang dicetak dan digandakan dan jilid	50 jenis	20.000.000
1.01.1.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7			Jumlah alat listrik	5 jenis	12.000.000
1.01.1.01.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8			Jumlah jenis peralatan kantor	7 jenis	97.000.000
1.01.1.01.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	9			Jumlah jenis peralatan dapur	5 jenis	4.000.000
1.01.1.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10			Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	2 jenis	50.000.000
1.01.1.01.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	120.000.000
1.01.1.01.05.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12			Jumlah rapat koordinasi	50 kali	250.000.000

1.01.1.01.05.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	IKM	BB	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana	100%	1.085.000.000
1.01.1.01.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1			Jumlah jenis pemeliharaan yang Dilaksanakan	1 kali (pengecatan kantor, pengecatan kantor, rehab wc) dan peralatan kebersihan kantor	125.000.000
1.01.1.01.05.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	2			Jumlah kendaraan operasional	1 unit dalmas	700.000.000
1.01.1.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3			Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	6 kendaraan roda dua, 8 unit kendaraan	250.000.000
1.01.1.01.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4			Jumlah computer dan laptop yang diservis	3 unit komputer, 6 unit laptop	10.000.000
1.01.1.01.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1	Kategori Nilai Indikator Kinerja	BB			300.000
1.01.1.01.05.01.03.01	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	1			jumlah pakaian kerja lapangan		300.000
1.01.1.01.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Kategori Nilai Indikator Kinerja	BB	Jumlah Laporan yang dihasilkan	6 dokumen	22.000.000
1.01.1.01.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	22.000.000
1.01.1.01.05.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Kategori Nilai Indikator Kinerja	BB			87.500.000
1.01.1.01.05.01.04.01	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Aparatur	1					12.500.000
1.01.1.01.05.01.04.02	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satgas Pol PP	2					75.000.000
4.00.04.1.01.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup yang ditindak lanjuti	BB	Persentase pengawasan dan pengendalian	100%	1.902.719.500

4.00.04.1.01.05.01.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1			Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	2.626 orang	90.000.000
4.00.04.1.01.05.01.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	2			Jumlah penertiban pelanggaran Perda dan Perbup	48 kali	1.512.719.500
4.00.04.1.01.05.01.15.14	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta Aturan-aturan Teknis dan Pelaksanaannya	3			Jumlah Perda yang akan di sosialisasikan	1 Perda Trantibum	300.000.000
4.00.04.1.01.05.01.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menajaga Ketertiban dan Keamanan	1	Rasio Satlinmas Nagari	BB	Kapasitas dan SDM Satlinmas	100%	97.250.000
4.00.04.1.01.05.01.19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	1			Jumlah Pembentukan dan Pembinaan terhadap Satlinmas Nagari dan Kasi Trantib Kecamatan	100 orang	77.250.000
4.00.04.1.01.05.01.19.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu	2					20.000.000
4.00.04.1.01.05.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup yang ditindak lanjuti	BB			106.347.500
4.00.04.1.01.05.01.20.01	Penyuluhan Pencegahan praktek perjudian, berkembangnya praktek prostitusi, penggunaan minuman keras dan narkoba	1			Jumlah peserta sosialisasi Pekat	100 orang	106.347.500
4.00.04.1.01.05.01.23	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Pembakaran	1	Persentase Penanganan Kebakaran	BB	Persentase penanganan kebakaran	100%	3.956.356.250
4.00.04.1.01.05.01.23.01	Pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	1			Jumlah peralatan yang memenuhi standar /pos jaga	4 pos jaga	2.000.000.000
4.00.04.1.01.05.01.23.03	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	2			Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	75 kejadian	1.546.216.250
4.00.04.1.01.05.01.23.04	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	3			Jumlah jenis peralatan keselamatan bagi Satgas Damkar	22 jenis	197.140.000
4.00.04.1.01.05.01.23.05	Pendidikan dan pelatihan pertolongan, pencegahan kebakaran dan bencana	4			Jumlah Kelompok Siaga Kebakaran yang terbentuk	25 nagari	100.000.000
4.00.04.1.01.05.01.23.06	Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	5					83.000.000
4.00.04.1.01.05.01.23.07	Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Manuali Pencegahan Bahaya Kebakaran	6					30.000.000

PENUTUP

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020. disusun berdasarkan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Barenlitbang Kabupaten Solok yaitu *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang tertib, aman dalam suasana yang kondusif ”* dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok dengan lebih efektif dan efisien.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2020.

Arosuka, Mai 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK



RENCANA KINERJA TAHUNAN
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok
TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	15
2	Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio satlinmas per Nagari	1 : 9
3	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Kategori nilai AKIP	B
3	Meningkatnya kualitas kualitas penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran	100%

Arosuka, Mai 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK**



Drs. EFRADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002